

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**OPTIMALISASI PENANGANAN ABRASI DI KAWASAN SUNGAI
ROKAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ROKAN HILIR
(STUDI KASUS DI KELURAHAN RIMBA MELINTANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

PITRA

NPM : 147310174

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Pitra
NPM : 147310174
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai
Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di
Kelurahan Rimba Melintang)

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Pembimbing

Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Pitra
NPM : 147310174
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Ketua

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Sekretaris

Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Anggota

Syaprianto, S.Sos M.IP

Mengetahui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 699/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Pitra
 N P M : 147310174
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Optimalisasi Penanganan Abrasi di kawasan Sungai Rokan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)..**

Struktur Tim :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Riski Setiawan, S.IP., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Syaprianto, S.Sos., M.IP | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 08 Januari 2021
 Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
 NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

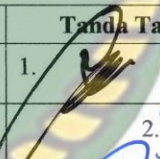
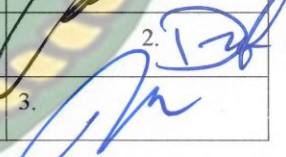
UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ~~kag~~UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 07 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 08 Desember 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Pitra
 NPM : 147310174
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : **Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang).**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
 Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Riski Setiawan, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Anggota	3. 

Pekanbaru, 08 Desember 2021
 An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pitra
NPM : 147310174
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai
Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di
Kelurahan Rimba Melintang)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Ketua

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

An. Tim Penguji
Sekretaris

Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul **“Optimalisasi Penanganan Abrasi Di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Di Kelurahan Rimba Melintang”** , dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak dapat bantuan, berupa waktu, tenaga, kritik dn saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis megucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Rizky Setiawan, S.Ip., M.Si sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah

banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau.

6. Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
7. Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir beserta staf yang telah membantu dan memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini.
8. Teristimewa orang tua penulis Alm. Ayahanda Hasan Basri dan Ibunda Roaina yang telah melimpahkan kasih sayang dan do'a yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
9. Saudara yang tercinta Kasmanita, Maryani, Misran, Asmira, Asmidar, Aan Joni Dan Iswandi.
10. Sahabat-sahabat saya M. Asri, M. Ayaturahman, Chandra sagita, owen dicafri,
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 khususnya kelas C yang telah banyak memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, aamiin aamiin ya rabbal`alamin...



Pekanbaru, 05 November 2021

Penulis

PITRA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	15
A. Studi Kepustakaan	15
B. Kerangka Pikiran.....	26
C. Konsep Operasional	27
D. Operasionalisasi Variabel	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Informen dan Keyformen.....	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31

G. Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir.....	34
B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.....	43
C. Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.....	43
D. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.....	44
E. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Identitas Reponden.....	47
B. Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Kelurahan Rimba Melintang).....	49
C. Dampak Bencana Abrasi Terhadap Masyarakat di Kelurahan Rimba Melintang.....	68
D. Faktor Penghambat Dalam Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang).....	74
BAB VI KESIMPULAN.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR KEPUSTAKAAN	81
DAFTAR LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

I.1	Kelurahan Dan Desa Yang Terkena Abrasi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	8
I.2	Kegiatan Pembangunan Turap Di Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007.....	11
II.1	Operasional variabel penelitian tentang Optimalisasi Penanganan Abrasi di kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)	28
III.1	Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Optimalisasi Penanganan Abrasi di kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)	32
IV.1	Kecamatan Dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir.....	36
IV.2	Jumlah Penduduk dirinci Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	39
V. 1	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia.....	47
V. 2	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
V. 3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I : Kerangka Pikiran tentang Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang).....	26
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara penelitian tentang Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang).....	84
2. Foto dokumentasi hasil observasi dan penelitian tentang Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang).....	87
3. SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR NOMOR: 326/UIR-Fs/Kpts/2021 Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU.....	103
4. Surat permohonan Rekomendasi Riset dari Universitas Islam Riau FISIPOL.....	104
5. Surat Rekomendasi Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.....	105
6. Surat Rekomendasi Riset dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.....	106
7. Surat Keterangan telah selesai Riset/Penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.....	107

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PITRA
NPM : 147310174
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Optimalisasi Penanganan Abrasi Di Kawasan Sungai Rokan
Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Rokan Hilir (Studi Kasus Di Kelurahan Rimba Melintang)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Serta Hukum Negara RI.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Pelaku pernyataan



PITRA

**OPTIMALISASI PENANGANAN ABRASI DI KAWASAN SUNGAI
ROKAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ROKAN HILIR
(STUDI KASUS DI KELURAHAN RIMBA MELINTANG)**

ABSTRAK

**PITRA
147310174**

Abrasi merupakan suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh gelombang laut dan arus laut atau pasang surut air laut yang bersifat merusak, tentu hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai kawasan sungai rokan di kelurahan Rimba Melintang karena akibat dari abrasi ini membuat hilangnya tempat tinggal seperti rumah, lahan pertanian, kebun-kebun masyarakat, dan juga jalan umum jika hal ini terus terjadi maka tidak dipungkiri akan tenggelamnya sebuah pulau hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang) dan sekaligus mengetahui Dampak Bencana Abrasi Terhadap Masyarakat di Kelurahan Rimba Melintang. Dalam penelitian ini yang menjadi keyformen adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air, sedangkan informen dari penelitian ini adalah masyarakat. Adapun jenis dan sumber data adalah primer dan skunder yaitu data yang diperoleh dari responden melalui pengambilan data dan wawancara dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang) ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi mengingat beberapa daerah yang telah dibangun turap atau tanggul sebagai penahan abrasi masih belum merata dan diharapkan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir segera melakukan pembangunan ataupun mengusulkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mengatasi abrasi dengan menyemarakkan penanaman pohon mangrove dan kegiatan penghijauan lainnya agar dampak abrasi dapat dikurangi.

Kata Kunci : Optimalisasi, penanganan, Abrasi

**OPTIMIZATION OF ABRATION HANDLING IN THE ROKAN RIVER
AREA BY THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND SPATIAL
ARRANGEMENTS OF ROKAN HILIR REGENCY
(CASE STUDY IN RIMBA MELINTANG SUB-DISTRICT)**

ABSTRACT

PITRA

147310174

Abrasion is a process of coastal erosion caused by ocean waves and ocean currents or sea tides that are destructive, of course this is very dangerous for people living on the coast of the Rokan river area in the Rimba Melintang village because the result of this abrasion makes the loss of housing such as houses, agricultural land, community gardens, and also public roads, if this continues, it is undeniable that the sinking of an island should be the government's concern. Rokan By the Public Works and Spatial Planning Office of Rokan Hilir Regency (Case Study in Rimba Melintang Village) and at the same time knowing the Impact of Abrasion Disasters on the Community in Rimba Melintang Village. In this study, the keyformer is the Head of the Water Resources Division, while the informants of this research are the community. The types and sources of data are primary and secondary, namely data obtained from respondents through data collection and interviews and this study uses qualitative methods using data collection methods through interviews, observation and documentation. From the results of this study, it can be concluded that the Optimization of Abrasion Handling in the Rokan River Area by the Department of Public Works and Spatial Planning of Rokan Hilir Regency (Case Study in Rimba Melintang Village) is still not optimal and needs to be improved considering that several areas have built plaster or embankments as The abrasion barrier is still not evenly distributed and it is hoped that the Public Works and Spatial Planning Office of Rokan Hilir Regency will immediately carry out construction or propose to the provincial government and central government to overcome abrasion by encouraging the planting of mangrove trees and other reforestation activities so that the impact of abrasion can be reduced.

Keywords: Optimization, handling, Abrasion

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke IV.

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Negara kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah.

Kedudukan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 18 dimana dalam Undang-Undang Dasar tersebut dijelaskan bahwa: “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur

dengan Undang-Undang, (2) pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, (3) pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis, (5) pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah, (6) pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, (7) susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang.”

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah dalam rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan urusan pemerintah, menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu daerah otonomi adalah provinsi riau dengan luas wilayah 107.932,71 km² jumlah kabupaten 10 (sepuluh) dan kota 2 (dua). Salah satu urusan yang disebutkan daerah Provinsi Riau adalah pekerjaan umum, terkait dengan luas kabupaten maka pemerintah daerah provinsi telah menetapkan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No.36 Tahun 2009 tentang uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau bagian keempat bidang sumber

daya air pasal 20 yang menjelaskan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam pencegahan abrasi yaitu: (1) Kepala seksi perencanaan teknis mempunyai tugas: Menyelenggarakan perencanaan teknis irigasi, awa, sungai, panai, danau, air baku, dan waduk; Pengelolaan hidrologi dan hidrometri; Melaksanakan penata usahaan bidang sumber daya air; Pemrosesan pemberian rekomendasi teknis untuk perizinan bidang sumber daya air dan penentuan peil banjir; Melaksanakan pengendalian dan penguatan kelembagaan dan kegiatan dibidang sumber daya air; Melaksanakan kerja sama antar lintas sektor dalam bidang sumber daya air; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. (2) Kepala seksi irigasi dan rawa mempunyai tugas: Pengembangan sarana dan prasarana irigasi dan rawa; Pengelolaan irigasi dan rawa; Pembangunan irigasi dan rawa; Peningkatan irigasi dan rawa; Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi dan rawa; Pemantauan dan evaluasi kondisi dan fungsi terhadap sarana dan prasarana irigasi dan rawa; Penanganan dan penanggulangan bencana alam pada daerah irigasi dan rawa; Melaksanakan tugas yang diberikan kepala bidang. (3) Kepala seksi sungai dan pantai mempunyai tugas: Konservasi sumber daya air; Pengelolaan, pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sungai, danau, pantai, air baku dan waduk; Pengendalian daya rusak air meliputi pencegahan, pembangunan peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir, abrasi, erosi pada sungai, pantai, dan waduk; Penanganan dan penanggulangan bencana alam pada sungai, pantai, danau, dan waduk daerah rawa; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Maka dari itu berdasarkan tugas dan fungsi diatas, kewenangan dalam masalah atau urusan abrasi merupakan wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau berdasarkan luas wilayah abrasi dan anggaran yang diperoleh oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya dalam pembagian tugas dan wewenang daerah kabupaten terdapat hukum yang menjadi aturan bagi daerah kabupaten yang dalam hal ini Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir No.50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir. Bagian ketiga bidang sumber daya air pasal 11 dalam mengatasi abrasi yaitu: (1) Bidang sumber daya air dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang sumber daya air mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis suervey, investigasi, dan penghuluan sumber daya air, pembangunan prasarana sumber daya air dan rehabilitas prasarana sumber daya air. (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) kepala bidang sumber daya air mempunyai fungsi: Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air diwilayah sungai meliputi perencanaan; Pelaksanaan kegiatan konstruksi; Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi; Pelaksanaan pendayagunaan sumber daya air Pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya; Pengendalian irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala negeri yang bertanggung jawab kepada sultan kerajaan siak. Distrik pertama didirikan belanda ditengah putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1880. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim cina berkembang pesat, maka belanda memindahkan pemerintahan kontroleurnya ke kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan lainnya diselat malaka hingga perang dunia pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari kecamatan tanah putih, kubu, dan bangko serta kecamatan rimbo melintang dan kecamatan bagan sinembah kemudian pada tanggal 4 oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan undang-undang nomor 34 tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai ibukota Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun kecamatan, kepenghuluan, dan kelurahan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 18 Kecamatan, 160 Kepenghuluan, dan 15 Kelurahan. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur pulau sumatera antara 1014'-2030' LU dan 100016'-101021' BT. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 km², Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 kecamatan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Tanah Putih seluas 1.915,23 km² dan kecamatan terkecil adalah kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas

wilayah 198,38 km². Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebelah utara berbatasan dengan provinsi sumatera utara dan selat malaka, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten bengkalis dan kabupaten rokan hulu, sebelah timur berbatasan dengan kota dumai, dan sebelah barat berbatasan dengan provinsi sumatera utara.

Adapun Luas wilayah di kelurahan Rimba Melintang yaitu 35,00 km² dan jumlah penduduk di kelurahan Rimba Melintang yaitu 6.894 jiwa, terdapat 8 RW dan 33 RT. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di kelurahan Rimba Melintang adalah dari hasil pertanian seperti kelapa sawit dan bertanam padi.

Kondisi abrasi akibat air pasang yang terjadi di bibir Sungai Rokan, Kabupaten Rokan Hilir tidak hanya menimpa wilayah jumrah dan teluk pulau hulu saja, namun semakin ke Muara salah satunya adalah wilayah kepenghuluan Sungai Sialang Hulu, kepenghuluan Bantaian, dan kelurahan Bantaian Hilir Kecamatan Batu hampar ikut terkena dampak abrasi yang menggerus lahan pertanian warga. Dalam kurun waktu sejak tahun 2012 hingga 2017 dengan lebar 200 meter panjang 2000 meter (2 km) tergerus arus Sungai Rokan. Dampak buruk akibat abrasi tersebut adalah sejumlah wilayah di sepanjang Sungai Rokan terancam kehilangan wilayah daratannya. Parahnya apabila air pasang bertambah musim ekstrim angin barat menghantam ketimur, posisi lahan sebelah timur, makanya karena posisi tanahnya tanah pasir dan rawa terlalu gampang kena ombak dan terjadi abrasi.

Laju abrasi dalam satu (1) tahun dapat mencapai 200 meter pertahunnya. Panjang kawasan abrasi yaitu kecamatan Rimba Melintang sepanjang 235,48 km merupakan terparah terkena bencana abrasi pantai. Kepenghuluan yang terkena abrasi yaitu kepenghuluan jumrah dan teluk pulau hulu, dan kelurahan rimba mkelintang, kecamatan Batu hampar sepanjang 284,31 km yang terkena dampak abrasi yaitu kepenghuluan Bantaian, Kelurahan Bantaian Hilir, dan kepenghuluan Sei Sialang Hulu, dan kecamatan Bangko sepanjang 475,26 km yang terkena dampak abrasi yaitu dekat kawasan perkantoran pemerintahan daerah tepatnya di Batu Enam.

Metode yang digunakan untuk menanggulangi abrasi pantai adalah dengan menggunakan struktur penahan gelombang dimana struktur tersebut berfungsi sebagai peredam energi gelombang pada area tertentu. Hantaman gelombang yang besar terus-menerus dapat diredam dengan cara mengurangi energi gelombang, sehingga energi gelombang yang mengenai bibir pantai menjadi lebih kecil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan struktur pemecah gelombang yang berfungsi untuk memecahkan, merefleksikan dan mentransmisikan energi gelombang.

Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah melakukan upaya rehabilitas kawasan mangrove dan peningkatan infrastruktur penahan gelombang selain melakukan penanaman pohon mangrove usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah dengan membangun turap atau tanggul sebagai pemecah gelombang. Namun kenyataannya yang terlihat bahwa pembangunan turap atau Tanggul masih belum optimal karena banyaknya kepenghuluan atau

daerah yang pada kenyataannya mempunyai dampak abrasi yang sangat parah, masih belum tersentuh pembangunan oleh pemerintah kabupaten yang mana daerah tersebut harus segera diselamatkan dari bencana abrasi yang setiap tahun makin meluas. Bahkan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel I.1 : Kelurahan dan Desa Yang Terkena Abrasi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Kecamatan	Kelurahan	Desa	Panjang Abrasi
Rimba Melintang	- Rimba Melintang	- Mukti Jaya	250 M dengan Panjang 1,5 Km
		- Teluk Pulau Hilir	1,5 Km dengan Panjang 5 Km
		- Teluk Pulau Hulu	200 M dengan Panjang 2 Km
		- Pematang Sikek	200 M dengan Panjang 3 Km
		- Jumrah	200 M dengan Panjang 3 Km
		- Seremban Jaya	100 M dengan Panjang 1 Km
			200 M dengan Panjang 1 Km

Sumber: Kecamatan Rimba Melintang 2021

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa ada 6 desa dan 1 kelurahan yang terkena abrasi di kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan panjang kawasan abrasi :

1. Kelurahan Rimba Melintang sepanjang 250 meter dengan panjang dari hilir ke hulu 1,5 kilometer, abrasi didaerah ini terjadi mulai pada tahun 1992 sampai dengan sekarang dan hanya dibangun turap satu kali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yakni pada tahun 2007 dan dibangun bronjong satu kali oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2016. Turap yang dibangun pada tahun 2007 tersebut hanya sepanjang 273 meter dengan

dana sebesar Rp. 1,5 miliar dan hanya bertahan selama 4 tahun, pada tahun 2011 abrasi kembali terjadi hingga sampai saat ini. Sedangkan pembangunan bronjong pada tahun 2016 oleh Pemerintah Provinsi Riau hanya sepanjang 130 meter dengan dana sebesar 1,5 miliar. Yang terkena abrasi ada 4 (empat) RT yakni RT 001, RT 004, RT 005 dan RT 030. RT 001 sebanyak 26 rumah, 1 mushola, 1 MDA dan 2 hektar lahan kebun, RT 004 sebanyak 49 rumah, 1 masjid dan pemakaman dengan luas 1/2 hektar, RT 005 sebanyak 38 rumah, SD swasta dan los pasar pekan rabu, RT 030 sebanyak 35 rumah dan 1 kantor babinsa.

2. Kepenghuluan Mukti Jaya sepanjang 1,5 kilometer dengan dari hilir ke hulu 5 kilometer. Abrasi didaerah ini merupakan abrasi terparah namun sekarang sudah tidak abrasi lagi dikarenakan timbulnya beting/tanah timbul. Abrasi terjadi sejak tahun 2000 – 2011 dan yang terkena abrasi adalah area persawahan.
3. Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir sepanjang 3 kilometer dari hilir ke hulu. Yang terkena abrasi lahan kebun.
4. Kepenghuluan Pematang Sikek sepanjang 200 meter dengan Panjang dari hilir ke hulu 2 kilometer. Yang terkena abrasi pemukiman penduduk dan 1 rumah suluk.
5. Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu sepanjang 200 meter dengan panjang dari hilir ke hulu 3 kilometer. Yang terkena abrasi pemukiman penduduk dan pasar.

6. Kepenghuluan Jumrah sepanjang 100 meter dengan panjang dari hilir ke hulu 1 kilometer. Pada tahun 2016 sudah dibangun bronjong namun hanya didekat jembatan jumrah saja. Proyek tersebut dibangun oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Bidang Pengairan Provinsi Riau dengan dana sebesar Rp. 1.561.002.000.
7. Kepenghuluan Seramban Jaya sepanjang 200 meter dengan panjang dari hilir ke hulu 1 kilometer. Pada tahun 2014 sudah dibangun turap namun hanya didekat jembatan jumrah saja dengan memakan dana sebesar 1,3 milyar melalui APBD Provinsi Riau. Namun baru satu bulan dibangun, kondisi turap sudah banyak mengalami keretakan.

Berdasarkan keterangan diatas, hanya sedikit yang terealisasi pembangunan turap atau bangunan penahan gelombang lainnya dari ke enam desa dan satu kelurahan. Antara semua desa dan kelurahan dikecamatan Rimba Melintang hanya desa Seramban Jaya, Jumrah, dan kelurahan Rimba Melintang yang pernah dibangun turap. Pembangunan turap didesa Seramban Jaya dan Jumrah tersebut menggunakan dana APBD Pemerintah Provinsi bukan dari APBD Kabupaten. Maka tugas ini bukan hanya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saja tetapi juga kerjasama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta peran dinas bersangkutan seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

**Tabel I.2 : Kegiatan Pembangunan Turap Di Kelurahan Rimba Melintang
Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2007**

Kelurahan	Uraian Kawasan Pelaksanaan Program	Panjang Pembangunan Turap	Sumber Dana
Rimba Melintang	Pembangunan Turap Penahan Gelombang Daerah Pekan/Pasar Lama	273 Meter	APBD Kabupaten

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
2021

Berdasarkan tabel I.2 diatas tentang kegiatan pembangunan turap tahun 2007, hanya sedikit yang terealisasi hanya sepanjang 273 Meter yang dibangun turap dan turap tersebut telah rusak dan lenyap ditelan sungai rokan yang akibatnya air sungai sudah melewati turap dan mendekati pemukiman dan jalan yang mengakibatkan dibongkarnya rumah waga dan rusaknya jalan, bencana abrasi didaerah itu kini sudah menggerus bibir pantai sepanjang 250 meter dengan panjang 1,5 km dan sampai sekarang belum mendapat perhatian oleh pemerintah setempat. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk pembangunan turap berasal dari APBD Kabupten Rokan Hilir yang tidak akan terealisasi pembangunannya dengan waktu singkat, sedangkan daerah tersebut sangat membutuhkan pembangunan turap ataupun sejenisnya untuk mengatasi masalah abrasi karena dampak abrasi yang dirasakan masyarakat adalah masalah yang serius yaitu ratusan rumah warga yang runtuh kesungai, lahan kebun, termasuk rumah ibadah, dan jalan yang ikut hancur. Maka tugas ini bukan hanya dilakukan

oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang saja tetapi juga kerjasama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta peran dinas bersangkutan seperti badan lingkungan hidup, dinas kelautan dan perikanan, dan dinas perkebunan dan kehutanan.

Dari pembahasan diatas terkait Optimalisasi Penanganan Abrasi Di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Di Kelurahan Rimba Melintang) yang mana fenomena tersebut menjadi penghambat atau persoalan yang perlu diatasi guna untuk memperbaiki kondisi sungai akibat abrasi. Maka fenomena yang dapat dilihat dari keterangan diatas yaitu sebagai berikut :

1. Abrasi di kelurahan rimba melintang kecamatan rimba melintang terjadi mulai tahun 1992 sampai dengan sekarang dan hanya dibangun turap satu kali oleh pemerintah daerah kabupaten rokan hilir yakni pada tahun 2007 dan hanya bertahan beberapa tahun.
2. Semenjak tahun 2007 belum pernah ada program pemerintah daerah kabupaten rokan hilir dalam pembangunan turap ataupun penahan gelombang lainnya di kelurahan rimba melintang, sementara abrasi sudah semakin parah dengan runtuhnya rumah warga, lahan perkebunan, dan jalan.
3. Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk mengatasi abrasi tidak hanya membangun turap atau bangunan penahan gelombang lainnya sebagai pemecah gelombang saja

tetapi perlu kerjasama dengan dinas kehutanan dengan menanam pohon bakau, namun kenyataanya sampai saat ini belum dilakukan.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan sesuai dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan fenomena diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Bagaimana Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)”**

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menangani abrasi di Kawasan Sungai Rokan (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)
- b. Apa saja dampak bencana abrasi terhadap masyarakat di Kelurahan Rimba Melintang

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai bahan pertimbangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengoptimalkan penanganan abrasi di sungai rokan di Kelurahan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Sebagai bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya mengenai penanganan dan pengendalian abrasi disungai rokan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya bagi jurusan Ilmu Pemerintahan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi bisa diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, kerangka-kerangka ilmiah, tesis dan disertai peraturan-peraturan, ketetapan buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.

Kerangka teori atau studi kepustakaan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan adalah teori-teori mengenai variabel permasalahan yang akan diteliti. Mardalis (2010;4).

1. Teori pemerintahan

Kata pemerintahan berasal dari kata dasar perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan. Setelah mendapat awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi mengurus. Setelah mendapat akhiran “an” menjadi pemerintahan menjadi perbuatan, cara atau perihal. Syafiie dan Andi Azikin, (2008;15).

Pemerintah dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin *gubernare*, Greek *gubernan* yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan. Menurut Awang dan Mendra Wijaya (2012;6) pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan gerakan dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara.

Menurut Woodrow Wilson (dalam Syafie Andi Azikin (2008;9) pemerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuasaan angkatan bersenjata. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Ndraha (2003;6).

Menurut Napitupulu (2007;9) istilah pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Menurut Syafie Andi Azikin (dalam Rahman, 2009;2) pemerintahan adalah sekelompok orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dan masyarakat, antar departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Strong mengatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan

untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu pemerintahan harus :

1. Harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang.
2. Harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang_undang.
3. Harus mempunyai kekuata finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka mmbiayai ongkos keberadaan negara dalam menjalankan peraturan, hal tersebut dalam penyelenggaraan kpentingan negara.

Sedangkan menurut rosenthal (syafiie, 2007;34) ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal daari struktur- struktur dan proses- proses pemrintahan umum.

Ndraha (2003;5) mempunyai pendapat pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil. Kemudian didalam Al-quran juga dijelaskan dengan memiliki definisi terhadap pengertian pemerintahan yang terdapat pada surat ke-3 ayat 104 dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak pada kebaikan, mengajak pada kebenaran, melarang dari hal buruk, itulah orang yang beruntung (syafiie Andi Azikin, 2008;10). Ndraha (2003; 6) menyatakan pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban

memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah. Lebih lanjut dinyatakan Ndraha bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan serta tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.

Adapun yang menjadi tugas dari pemerintah menurut Atmosudirdjo (dalam syafiie, 2011;9) antara lain adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan. Sedangkan menurut Nugroho (2003;75) menjelaskan bahwa didalam masyarakat terdapat 3 jenis tugas pokok yang diperlukan agar masyarakat hidup, tumbuh dan berkembang, yaitu tugas pelayanan, tugas pembangunan dan tugas pemberdayaan.

1. Tugas pelayanan adalah tugas memberikan pelayanan kepada umum tanpa membedakan dan diberikan secara Cuma-Cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu pun mampu menjangkaunya.
2. Tugas pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat.
3. Tugas pemberdayaan adalah peran untuk membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Makna pada konsep diatas dapat dianggap sebagai suatu konsekuensi dari pemberian wewenang atau tanggung jawab pemerintah atasan / pusat kepada pemerintah daerah yang diikuti pula dengan sumber pembiayaan dan pada akhirnya disertai juga dengan pengawasan terhadap pelimpahan tanggung jawab tersebut. Pemerintahan dalam gejala yang kompleks dan berkembang dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang.

Sedangkan konsep pemerintahan menurut Rasyid dalam Giroth (2004; 65) adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah selanjutnya pemerintahan memaknai sebagai proses yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara cara memberi pelayanan bagi kemajuan bangsa bersama. Selanjutnya tugas pokok pemerintah, dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu :

- a) Pelayanan (*service*)
- b) Pemberdayaan (*empowerment*)
- c) Pembangunan (*development*)

2. Konsep peranan

Peranan menurut Soerjono Soekanto (2002:237), bahwa yang dimaksud dengan peranan (role) merupakan aspek dinamis dan kedudukan (status). Yaitu apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut merupakan peran.

Menurut Ndraha (2003:53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Soekanto (2001:269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian :

- a. Peranan meliputi norm-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Suhardono (2004:10), mengatakan bahwa sebenarnya istilah peran sudah dengan sendirinya diperlakukan secara perspektif (sebagai patokan), artinya menunjuk pada perilaku yang mengandug pada keharusan (oughtness, shouldness) untuk dibawaikan. Patokan yang dianut secara tak kasat mata (convert) disebut sebagai norma sedang yang dianut secara kasat mata adalah tuntutan (demand).

Menurut miftah thoha (2012;10) peran timbul karena seorang manajer memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Lingkungan ini luas dan berneka macam, dan saat masing- masing manajer mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Baik manajer tingkat atas, tengah maupun bawah akan mempunyai jenis peranan yang sama, hanya berbeda lingkungan yang akhirnya membuat bobot peranan itu sedikit berbeda.

Selanjutnya susanto menjelaskan (dalam soekanto 2001;94) bahwa: “dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau biasa disebut status objektif.

3. Konsep Optimalisasi

Menurut winardi (1996:363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu tujuan. secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Mengacu pada pendapat singiresu S Rao, jhon wiley dan sons (2009) optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi.

4. Konsep kebijakan

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk

mencapai tujuan. Pada prinsipnya, pihak yang memuat kebijakan- kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Menurut Prof. Miriam Budiardjo (2008;20). N.Dunn (2003;29) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud mencapai tujuan (*a course of action intended to accomplish some end*).

Menurut anderson (dalam indihono, 2009; 17) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Sedangkan kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi- instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Permasalahan dalam masyarakat yang perlu ditangani adalah sangat luas meliputi berbagai bidang sektor kehidupan, maka diperlukan berbagai kebijakan publik yang sesuai dan terarah, agar supaya tujuannya secara efektif dan efisien. Adisasmita (2011;113).

Kemudian kebijakan publik menurut james Anderson (dalam Agustiono, 2008;7) adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan diikuti dan dilaksanakannya oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintahan melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan memperoleh aspek yang penting dari

keseluruhan proses mengambil dan menentukan keputusan pemerintahan Sumaryadi (2013;83).

5. Abrasi

Abrasi adalah proses perubahan bentuk pantai atau erosi pantai yang disebabkan oleh gelombang laut, arus laut, dan pasang surut. Penyebab abrasi karena faktor alam dan atau faktor manusia. Proses terjadinya abrasi karena faktor alam disebabkan oleh angin yang bertiup diatas lautan yang menimbulkan gelombang dan arus laut mempunyai kekuatan untuk mengikis daerah pantai. Sedangkan faktor manusia misalnya kegiatan penambangan pasir, kegiatan reklamasi. Kodotie (2010;329)

6. Pembangunan

Menurut Coralie Bryant Dan Louise White (dalam Taliziduhu Ndraha. 1990;15-16) pembangunan adalah upaya yang meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut.

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (capacity)
2. Pembangunan berarti mendorong tubuhnya bersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (equality)
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.

Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan bersama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (empwermment)

4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (sustainability)
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (interdependence)

Menurut Taliziduhu Ndraha (2001;134) pembangunan pemerintah adalah pembangunan kemampuan pemerintah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik layanan civil.

7. **Pengelolaan**

Menurut Kodotie (2010;61) pengelolaan didefinisikan sebagai suatu aktifitas, seni, cara, gaya, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dalam mengendalikan atau mengelola kegiatan.

Tahap pengelolaan dimulai dari :

1. Pengorganisasian
2. Operasi
3. Pemeliharaan
4. Organisasi
5. Kepemimpinan
6. Pengendalian sampai evaluasi dan monitoring

8. Pengendalian

Menurut Taliziliduhu Ndraha (2011:199) Pengendalian adalah setiap keputusan yang dibuat berisi kendali sebagai alat untuk mengarahkan organisasi pada tujuan, dalam kecepatan tertentu.

Menurut Robert J.Kodotie (210:64) pengendalian merupakan upaya kontrol pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap SDM organisasi hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari keseluruhan kegiatan yang ada manfaat dari pengendalian ini dapat meningkatkan eksistensi dan efektifitas dari sisi-sisi waktu (time), ruang (space), biaya (cost) dan sekaligus untuk peningkatan kegiatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Pengendalian ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengetahui bagaimana kegiatan itu bekerja penyimpangan atau kesalahan dapat segera diketahui dan diperbaiki. Pengendalian ini juga berfungsi untuk menekan kegiatan kecil mungkin dan juga harus menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi normal ke kondisi kritis.

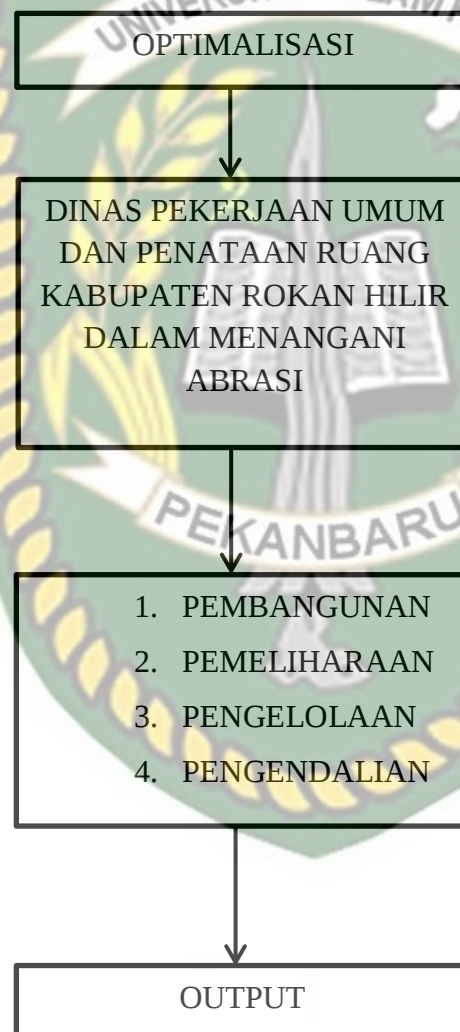
9. Pemeliharaan

Dalam pemeliharaan, penganggaran juga menjadi salah satu factor utama suksesnya suatu pembangunan baik dalam situasi normal maupun darurat. Kodotie (2010;64-65). Pemeliharaan prasarana sumber daya air terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air. Kodotie (2010;379).

B. Kerangka Pikiran

Adapun kerangka Pikiran dari “Optimalisasi Penanganan Abrasi Di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Di Kelurahan Rimba Melintang”

Gambar II.1



Sumber : *Modifikasi Penulis, Tahun 2021*

C. Konsep Operasional

Untuk memberi pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui konsep operasional sebagai berikut :

1. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu tujuan. secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.
2. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengendalian daya rusak air.
3. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.
4. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.
5. Pengendalian adalah keputusan yang dilakukan untuk mengawasi pembangunan turap supaya tidak terjadi penyelewengan kekuasaan.
6. Pembangunan adalah upaya pencegahan abrasi yang dilakukan dengan bangunan turap.
7. Pengelolaan adalah kerja sama yang dilakukan dengan dinas terkait.
8. Pemeliharaan adalah menjaga lingkungan dengan memberikan peran masyarakat didalamnya.

D. Operasionalisasi variabel

Tabel II.1 : Operasional variabel penelitian tentang Optimalisasi Penanganan Abrasi Dikawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu tujuan. secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Winardi (1996:363)	Optimalisasi Penanganan Abrasi di kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)	1. Pembangunan 2. Pengelolaan 3. Pengendalian 4. Pemeliharaan	a. pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan. b. Pengelolaan dengan sub indikatornya Rehabilitasi hutan dengan dinas kehutan dan kelayakan bangunan turap sesuai dengan fungsi turap sebagai penahan gelombang. c. Pengendalian dengan sub indikatornya Pengawasan pembangunan turap dan pencegahan penebangan hutan dan galian pasir. d. Pemeliharaan dengan sub indikatornya Sosialisasi dengan masyarakat kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan data deskriptif. Tipe penelitian adalah observasi yaitu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Wiratna Sujarweni (2014;32)

B. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan wilayah sungai rokan di Kelurahan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dimana melihat kondisi alam yang terjadi, abrasi merupakan ancaman besar bagi masyarakat yang tinggal dipesisir pantai maupun dipulau-pulau kecil, yang seharusnya menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah. Maka dari itu penulis mengambil masalah abrasi tersebut.

C. Informen dan keyformen

Adapun Keyformen dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui wawancara sekaligus pengambilan data. Adapun Informen dalam penelitian adalah :

1. Masyarakat yang merasakan dampak secara langsung dari abrasi melalui wawancara

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui pengambilan data dan hasil wawancara yang didapat. Data primer yang dimaksud adalah tentang Optimalisasi Penanganan Abrasi di kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang peroleh peneliti dari dalam keadaan sudah tersedia ditempat penelitian dilakukan meliputi peraturan perundang-undangan tentang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, struktur organisasi dan data pendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah :

1. Wawancara (*interview*) yaitu melakukan dialog secara mendalam atau percakapan (tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari

responden guna melengkapi data yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dalam kebutuhan penelitian ini.

2. Observasi / pengamatan langsung ketempat penelitian dimana penulis langsung mengunjungi langsung ketempat penelitian untuk memperoleh data-data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang diperlukan adalah deskriptif yaitu suatu analisis yang berusaha memberikan gambaran yang terinci berdasarkan kenyataan yang ditemui di lapangan.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data dianalisis secara kuantitatif yang dilengkapi dengan data.

G. Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.1 : Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian tentang Optimalisasi Penanganan Abrasi Dikawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)

No	Jadwal Kegiatan	Tahun 2021									
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x									
2	Seminar UP		x								
3	Revisi UP				x	x					
4	Riset						x				
5	Penelitian Lapangan							x			
6	Pengolahan dan Analisis Data								x		
7	Konsultasi Skripsi									x	
8	Ujian Skripsi									x	
9	Revisi dan Pengesahan Skripsi										x
10	Pengesahan dan Peyerahan Skripsi										x

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontrolleur-nya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir. (Dev By Tim IT Diskominfo Kabupaten Rokan Hilir)

2. Letak Geografis Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir memiliki letak Geografis yang strategis, karena pada jalur pelayaran Internasional Selat Malaka. Keunggulan Geografis ini menempatkan Kabupaten Rokan Hilir menjadi salah satu gerbang lintas Regional bagi Propinsi Riau atau ke Selangor-Malaysia mau pun ke Sumatera Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan laporan Kependudukan bulan Juni 2003 berjumlah 432.385 orang, kepadatan penduduk mencapai 48 orang per km² dan tingkat pertumbuhan mencapai 5,6% pertahun. Penduduk Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari berbagai kelompok etnis, suku Melayu merupakan etnis terbesar dan merupakan Masyarakat asli Daerah dan suku-suku lainnya umumnya merupakan pendatang kemudian menetap, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Suku Jawa 2. Suku Tiongha dan Cina 3. Suku Bugis 4. Suku Aceh 5. Suku Batak 6. Suku Minang 7. Suku Arab dan lain-lainnya. Hasil-hasil utama dari Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut: 1. Perkebunan dan Agroindustri 47 Kabupaten Rokan Hilir memiliki wilayah perkebunan yang luas yang berpotensi bagi perkembangan Agro Industri dan Agrowisata, Bagan Batu merupakan kota Agroindustri di Kabupaten Rokan Hilir, hasil perkebunan utama antara lainnya Karet dan Kelapa Sawit. 2. Persawahan dan Tanaman pangan Lahan kering dan basah yang dimiliki Kabupaten Rokan Hilir yang diusahakan komunitas ini umumnya terletak disepanjang DAS Sungai Rokan hingga ke Muaranya, dengan luas lahan pada tahun 2003 tercatat seluas 47.248 Hektar dan

produksi mencapai 125.841 Ton. Daerah penghasil beras terbesar di beberapa Kecamatan seperti, Kecamatan Rimbo Melintang, Kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Sinaboi, kecamatan Kubu dan Kecamatan Pasir Limau Kapas. 3. Perikanan Di Kabupaten Rokan Hilir memiliki Kota Nelayan seperti, Panipahan, Pulau Halang dan Sinaboi merupakan penghasil ikan terbesar di Kabupaten Rokan Hilir. Sebagian besar hasil perikanan tersebut di Ekspor ke luar Negeri khususnya ke Malaysia dan Singapura, produk utama perikanan di Kabupaten Rokan Hilir adalah Ikan Segar, Udang, Ikan Asin, Terasi dan lain-lainnya. Sebelum perang Dunia ke II Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kota Bagansiapiapi terkenal sebagai penghasil Ikan terbesar kedua di Dunia. 48 Produksi perikanan di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 80.000 Ton pertahun terdiri dari 95,50% perikanan dari Laut dan 4.50% perikanan air tawar. 4. Pertenakan Kabupaten Rokan Hilir memiliki beraneka ragam jenis ternak, pada tahun 2003 populasi ternak yang tercatat 2.129 ekor Lembu, 883 ekor Kerbau, 23.819 ekor Kambing dan 4.388 ekor Babi, disamping itu produksi daging pada tahun 2003 terhitung sebesar 714.160 kg dan telur Ayam mencapai 510.088 Butir. 5. Kehutanan Area hutan di Kabupaten Rokan Hilir tercatat seluas 888,159 Hektar, berdasarkan fungsinya hutan di Kabupaten Rokan Hilir dapat dibedakan yaitu, 155.486 Hektar hutan lindung, 559 Hektar hutan Konservasi, 341.724 Hektar hutan Produksi terbatas, 266.059 Hektar hutan Produksi tetap, dan 124.332 Hektar hutan Produksi. Tahun 2003 tercatat produksi kehutanan sebesar 458,824.17 m³. Terdiri dari 9.779,90 m³ kayu gergajian, 110,327.55 m³ kayu bulat dan 364.83 m³ kayu olahan.

Kabupaten Rokan Hilir terletak di bagian paling utara dari Provinsi Riau yang juga merupakan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera. Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 Km² atau 888.159 Hektar, terbagi atas 18 kecamatan. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada koordinat 1°14' sampai 2°45' Lintang Utara dan 100°17' hingga 101°21' Bujur Timur.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebelah utara berbatasan dengan provinsi sumatera utara dan selat malaka, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten bengkalis dan kabupaten rokan hulu, sebelah timur berbatasan dengan kota dumai, dan sebelah barat berbatasan dengan provinsi sumatera utara. Saat ini kabupaten rokan hilir memiliki 18 kecamatan yang terdiri dari 18 Kecamatan, 160 Kepenghuluan, dan 15 Kelurahan.

Tabel IV.1: Kecamatan Dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Rokan Hilir

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Bagan Sinembah	Bagan Batu	13
2	Bagan Sinembah Raya	Bagansinembah Kota	10
3	Balai Jaya	Balai Jaya Kota	11
4	Bangko	Bagansiapiapi	15
5	Bangko Pusako	Bangko Kanan	16
6	Batu Hampar	Bantaian Hilir	5

7	Kubu	Teluk Merbau	10
8	Kubu Babussalam	Rantau Panjang Kiri	12
9	Pasir Limau Kapas	Panipahan	8
10	Pekaitan	Pedamaran	10
11	Pujud	Pujud Selatan	11
12	Rantau Kopar	Rantau Kopar	4
13	Rimba Melintang	Rimba Melintang	12
14	Simpang Kanan	Simpang Kanan	6
15	Sinaboi	Sinaboi	6
16	Tanah Putih	Sedinginan	17
17	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar	6
18	Tanjung Medan	Tanjung Medan	12

Sumber: *badan pusat statistik kabupaten rokan hilir 2021*

Pada tabel diatas menunjukkan dimana jumlah desa/kelurahan terbanyak di kecamatan tanah putih dengan jumlah 17 desa/kelurahan, lalu disusul dengan kecamatan bangko pusako yang memiliki desa/kelurahan berjumlah 16. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan paling sedikit yaitu kecamatan rantau kopar yang berjumlah 4 desa/kelurahan.

3. Profil Kelurahan Rimba Melintang

Kelurahan rimba melintang adalah suatu wilayah di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Rimba Melintang memiliki luas wilayah – 2.500 Ha. Secara administratif kelurahan rimba melintang dibagi menjadi 8 (delapan) rukun warga (RW), 33 (tiga puluh tiga) rukun tetangga (RT) , kelurahan Rimba melintang merupakan kelurahan dari kecamatan Rimba melintang yang dahulu masuk dalam wilayah administratif kecamatan bangko pusako. Kelurahan Rimba melintang sebelum dimekar pada tahun 2012 adalah salah satu induk yang telah dimekarkan menjadi empat kepenghuluan diantaranya:

1. Kepenghuluan seremban jaya
2. Kepenghuluan pematang botam
3. Kepenghuluan harapan jaya
4. Kelurahan Rimba melintang.

Kelurahan Rimba melintang terletak diibukota kecamatan Rimba melintang, sebelah utara berbatas dengan kepenghuluan seremban jaya, sebelah selatan berbatas dengan Kepenghuluan pematang botam, sebelah timur berbatas dengan tanah putih tanjung melawan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan harapan jaya

1. Kependudukan di Kelurahan Rimba melintang

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Jumlah penduduk kelurahan | : 6.967 |
| 2. Jumlah kepala keluarga | : 1772 |
| 3. Jumlah kepala keluarga miskin | : 341 KK (3,41%) |

4. Jumlah penduduk beragama islam : 6.523 orang
5. Jumlah penduduk non muslim : 273 Orang

Tabel IV.2: Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-3 tahun	168	246	414
2	4-6 tahun	273	266	539
3	7-11 tahun keatas	403	413	788
4	13-15 tahun	323	396	816
5	16-18 tahun	523	500	1.023
6	19 tahun keatas	1.722	1.736	3.458
7	jumlah	3.496	3.471	6.967

Kelurahan Rimba Melintang memiliki sarana pendidikan yang terdiri dari SD 4 (empat) Unit dengan jumlah murid 720 orang, MTS 1 (satu) Unit dengan jumlah murid 390 orang, SMA 3 (tiga) Unit dengan jumlah murid 540 orang. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Rimba melintang memiliki mata pencaharian sebagai petani/pekebun. Hampir 70% masyarakat yang bekerja sebagai petani/pekebun, selebihnya bekerja sebagai PNS, guru honorer, nelayan, dan wirausaha/pedagang.

1. Demografi Kelurahan Rimba melintang

Kelurahan Rimba melintang terletak didalam wilayah Kecamatan Rimba melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yang berbatasan :

- sebelah utara berbatas dengan kepenghuluan seremban jaya
- sebelah selatan berbatas dengan Kepenghuluan pematang botam
- sebelah timur berbatas dengan tanah putih tanjung melawan
- sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan harapan jaya

Luas wilayah Kelurahan Rimba melintang adalah 2.500 Ha dimana 100% berupa daratan yang berfotografi dataran rendah dengan wilayah rawa, 0%. Adapun iklim di Kelurahan Rimba melintang sebagaimana desa-desa lain diwilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan hujan. Hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola perkebunan sawit maupun pertanian yang ada Kelurahan Rimba melintang kecamatan Rimba melintang.

2. Keadaan Sosial

Mayoritas penduduk Kelurahan Rimba melintang di dominasi suku melayu, selebihnya merupakan perantauan jawa dan batak. Hampir 70% penduduk Kelurahan Rimba melintang merupakan masyarakat asli daerah tersebut dan 30% nya merupakan masyarakat pendatang dari berbagai daerah. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat

sejak adanya Kelurahan Rimba melintang dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan benturan-benturan antara kelompok masyarakat.

3. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Rimba melintang sudah berkategori maju. Sebagian besar masyarakat memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas. Selain itu, sektor perikanan juga sangat menjanjikan. Bidang-bidang kewirausahaan juga berkembang dengan pesat, terbukti dengan banyaknya ruko-ruko besar yang dimiliki masyarakat. Di sisi lain, banyak juga masyarakat yang bekerja di bidang pemerintahan seperti PNS, baik ditingkat desa maupun tingkat kecamatan.

4. Pembagian wilayah kelurahan

Pembagian wilayah dibagi menjadi 8 (delapan) Rukun warga (RW), dan 33 (tiga puluh tiga) rukun tetangga (RT).

5. Potensi yang ada di Kelurahan Rimba melintang adalah :

a. Pendidikan

Adanya gedung sekolah dari tingkat SMA,SMP/MTS,SD dan TK.

b. Kesehatan

Adanya puskesmas kecamatan dan bidan desa

c. Sarana dan prasarana

- Adanya jalan umum skala kabupaten

- Adanya jalan desa penghubung antar desa
- Adanya jalan gang penghubung antar rumah (lingkungan)
- Adanya kantor kelurahan

d. Sosial budaya

- Masjid
- Mushola
- Tempat pemakaman umum (TPU)

e. Koperasi dan usaha masyarakat

- Bengkel motor
- Bengkel las
- Pertukangan kayu

f. Pemerintahan

- Struktur aparaturnya kelurahan lengkap
- Sarana kantor kelurahan berupa perlengkapan komputer, meja, kursi, dan lemari
- Adanya kendaraan roda dua.

g. Pertanian

- Adanya perkebunan sawit
- Adanya kebun sawit
- Adanya ternak sapi, ayam dan kambing.



B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten rokan hilir yang beralamatkan Jl. Lintas Bagansiapiapi - Ujung Tj., Bagan Punak Pesisir, Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dengan kepala dinas dipimpin oleh Drs. H Jon Safrindow, MSi.

C. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir

Adapun visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten rokan hilir sebagai berikut:

Visi Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir “Terwujudnya Hasil Pekerjaan Umum Yang Refresentatif Untuk Mewujudkan Kawasan Andalan Perekonomian Yang Berbasis Kerakyatan”.

Sedangkan misi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten rokan hilir adalah:

1. Meningkatkan system dan fungsi prsarana jalan untuk kelancaran perekonomian dan membuka hubungna antar daerah.
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat serta menyiapkan jaringan irigasi untuk meningkatkan ketahanan pangan.

3. Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir adalah “sesuai dengan peraturan daerah kabupaten rokan hilir no. 11 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah dan peraturan bupati no.50 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sedangkan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir adalah :

1. Merumuskan kebijakan ;
2. Pengambilan keputusan ;
3. Perencanaan ;
4. Pengorganisasian ;
5. Pelayanan umum dan teknis ;
6. Pengendalian/pengarahan dan bimbingan ;
7. Pengawasan ;

8. Pemantauan dan evaluasi ;
9. Pelaksanaan lapangan ;
10. Pembiayaan ;
11. Penelitian dan pengkajian ;
12. Pelaporan.

E. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir

Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari ;
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Sumber Daya Air;
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Suber Daya Air
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa
 - c. Seksi Sungai, Pantai dan Danau
4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan

- b. Seksi Pembangunan Jalan
- c. Seksi Pembangunan Jembatan
- 5. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jembatan
- 6. Bidang Cipta Karya;
 - a. Seksi Perencanaan Keciaptakarya
 - b. Seksi Gedung dan Bangunan
 - c. Plt. Air Bersih dan Sarana Lingkungan
- 7. Bidang Tata Ruang;
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 8. Bidang Jasa Konstruksi;
 - a. Seksi Jasa Konstruksi
 - b. Seksi Pelayanan Pengembangan Teknis
 - c. Seksi Pengujian dan Peralataan
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam bab ini peneliti mencoba menjelaskan identitas responden yang telah ditentukan dan informasinya dapat diketahui melalui tahap wawancara sehingga dapat menjawab segala kebutuhan yang diperlukan oleh peneliti. Adapun informasi yang dapat disajikan oleh peneliti tentang responden sebagai berikut :

1. Tingkat Usia Responden

Berdasarkan tingkat usia responden maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang didapat pada saat melakukan wawancara dilapangan oleh peneliti untuk keyformen dan informennya sebagai berikut :

Tabel V.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Responden	Tingkat Usia				Jumlah
		21-30	31-40	41-50	>51	
1	Kepala Bidang Sumber Daya Air			1		1
2	Lurah Rimba Melintang				1	1
3	Masyarakat		2	1	1	3
Jumlah			2	2	2	6

Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.1 di atas dapat diketahui bahwa yang memiliki usia rentang 31-40 tahun 2 orang, rentang usia 41-50 tahun 2 orang, dan usia diatas 51 tahun 2 orang. Jumlah keseluruhan responden adalah 6 orang terdiri dari Kepala

Bidang Sumber Daya Air, Lurah Rimba Melintang, dan 4 orang masyarakat setempat yang tinggal di sekitaran sungai rokan.

2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tingkat pendidikan responden, dapat dilihat dari tabel di bawah ini informasi mengenai tingkat pendidikan responden sebagai berikut :

Tabel V.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Responden	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SD	SM P	SM A	Sarjana	
1	Kepala Bidang Sumber Daya Air				1	1
2	Lurah Rimba Melintang				1	1
3	Masyarakat	4				4
Jumlah		4			2	6

Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.2 di atas dapat diketahui bahwa terdapat 4 orang masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 2 orang Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Lurah Rimba Melintang mempunyai tingkat pendidikan Sarjana.

3. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan jenis kelamin responden dapat disajikan pada tabel dibawah ini dari informasi yang didapat lapangan oleh peneliti sebagai berikut :

Tabel V.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Responden	Tingkat Pendidikan		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Bidang Sumber Daya Air	1		1

2	Lurah Rimba Melintang	1		1
3	Masyarakat	3	1	4
Jumlah		5	1	6

Data Olahan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat 6 orang responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki 5 orang yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Air, Lurah Rimba Melintang, dan 3 orang masyarakat. Sedangkan jumlah jenis kelamin perempuan yaitu 1 orang dari masyarakat.

B. Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Kelurahan Rimba Melintang)

Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir yang dapat juga mengancam garis sungai sehingga mundur kebelakang yang mengakibatkan daratan makin terkikis dan sungai makin meluas, tentu hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat khususnya bagi yang tinggal ditepi sungai karena akibat dari abrasi ini membuat hilangnya lahan pertanian, kebun-kebun masyarakat, rumah masyarakat dan juga jalan umum jika hal ini terus terjadi. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah melalui program-program untuk mengatasi masalah abrasi dan kerja sama dengan masyarakat setempat agar tidak menebang pohon bakau secara liar.

Adapun di Kelurahan Rimba Melintang yang mempunyai jumlah penduduk sebagian besarnya suku melayu dengan mata pencaharian berkebun kelapa sawit dan sebagai nelayan. Mayoritas masyarakat yang tinggal di pesisir sungai lebih banyak menanam pohon sawit dari pada menanam pohon bakau yang berfungsi untuk menahan gelombang air sungai agar tidak terjadi pengikisan abrasi secara terus menerus. Penanggulangan masalah abrasi oleh Dinas Pekerjaan Umum bidang Sumber Daya Air masih sangat kurang dikarenakan masih terjadinya abrasi yang mengakibatkan rumah dan perkebunan penduduk hanyut tenggelam.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penanganan abrasi di kawasan sungai rokan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi kasus Kelurahan Rimba Melintang) sebagai berikut :

1. **Pembangunan**

Pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi janji politik kepada rakyat. Pembangunan sangat penting karena menjadi kebutuhan rakyat yang dapat memberikan kemudahan kepada rakyat dan tujuan yang harus dicapai dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Welly Zukiar, ST (Kepala Bidang Sumber Daya Air) mengatakan:

“Abrasi yang terjadi di Kecamatan Rimba Melintang sepanjang tahun 1992 sampai dengan sekarang menjadi perhatian kami dalam mencari solusi yang

tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Pada saat kami melakukan kunjungan di beberapa daerah yang terdampak masalah abrasi selalu menemukan keluhan dari masyarakat tentang pengikisan yang terjadi di bibir sungai. Bahkan pohon bakau sendiri tidak mampu menahan derasnya gelombang air pasang yang terjadi setiap harinya.”

(Hari Selasa, 15 September 2021 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air, pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara dan observasi penulis lakukan, dapat disimpulkan pembangunan yang dilakukan pemerintah khususnya dinas terkait perlu memperhatikan dan mengestimasi cara yang tepat agar permasalahan abrasi dapat teratasi dengan baik. Selain dari pembangunan perlu juga didukung penanaman pohon bakau secara besar-besaran dengan mengalihkan penanaman sawit dipinggir sungai diganti dengan pohon bakau atau sejenisnya yang dapat menahan gelombang air sungai.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Welly Zukiar, ST (Kepala Bidang Sumber Daya Air) tentang program pembangunan yang dilakukan dinas PUTR dalam menangani abrasi di Kelurahan Rimba Melintang :

“Semenjak tahun 2019 sampai saat ini pembangunan belum ada terealisasi disebabkan belum adanya anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan turap. Anggaran yang biasanya dikelola oleh dinas PUTR dialihkan untuk mengatasi masalah Covid-19 sehingga saat ini kami hanya dapat melakukan pemantauan terkait daerah-daerah yang masih terkena abrasi. Namun, pada

tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi Covid-19 kami telah membangun turap di beberapa daerah aliran sungai besar dan rumah layak huni bagi masyarakat yang rumahnya hancur akibat abrasi.”

(Hari Selasa, 15 September 2021 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air, pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis lakukan, dapat dijelaskan bahwa saat ini dinas PUTR tidak dapat mengoptimalkan pembangunan dalam mengatasi abrasi yang disebabkan belum adanya anggaran yang cukup untuk pembangunan turap / talud / tanggul untuk menahan abrasi. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat agar dapat mengalokasikan dana operasional pemerintah tidak hanya berfokus pada permasalahan covid-19, namun permasalahan abrasi juga perlu diprioritaskan karena menyangkut keselamatan dan perekonomian masyarakat. Dan informasi yang diterima oleh peneliti lapangan untuk pembangunan pencegahan abrasi sangat minim yang dilakukan oleh pemerintah sehingga kerusakan abrasi terjadi terus menerus yang mengakibatkan rusaknya wilayah pesisir sungai dan merobohkan jembatan serta jalan akibat dari abrasi. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan tanpa adanya campur tangan dari dinas terkait untuk mengatasi kerusakan tersebut maka dapat berdampak pada kesenjangan baik dari segi sosial, perekonomian, maupun ekosistem di daerah pesisir sungai.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Welly Zukiar, ST (Kepala Bidang Sumber Daya Air) tentang dinas atau instansi yang melakukan koordinasi dengan dinas PUTR :

“untuk koordinasi sendiri pihak dinas pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan koordinasi dalam rangka pembangunan untuk menangani abrasi dengan dinas/instansi terkait seperti pihak camat menyampaikan laporan terkait abrasi terhadap dinas pekerjaan umum dan penataan ruang serta pihak kami melakukan koordinasi dengan dinas kehutanan dan BPBD ”

(Hari Selasa, 15 September 2021 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air, pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis lakukan, dinas atau instansi yang bekerja sama dengan dinas PUTR bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam mengatasi wilayah yang terkena abrasi dan membantu masyarakat yang terdampak abrasi. Koordinasi tersebut sangat penting karena dinas PUTR tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan dari beberapa dinas atau instansi terkait agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Dinas atau instansi tersebut telah memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang dapat memperlancar penanganan masalah abrasi.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Welly Zukiar, ST (Kepala Bidang Sumber Daya Air) tentang penyusunan program untuk pembangunan penanganan abrasi :

“untuk penyusunan program dalam rangka pembangunan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang meminta laporan dari pihak kecamatan serta melakukan survei lapangan setelah itu kami mengajukan proposal ke pihak BPBD dalam rangka upaya pembangunan dalam menangani abrasi tersebut dan proposal ke pihak dinas kehutanan untuk melakukan reboisasi pohon bakau disekitaran pinggir sungai rokan.”

(Hari Selasa, 15 September 2021 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air, pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara dan observasi penulis lakukan, dapat dijelaskan bahwa walaupun dinas PUTR belum mendapatkan anggaran yang cukup untuk mengatasi permasalahan abrasi. Dinas tersebut tetap berupaya untuk membantu masyarakat yang terdampak abrasi dengan meminta bantuan kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membantu dana pembangunan turap atau talud dan Dinas Kehutanan untuk membantu melakukan penghijauan kembali di area pesisir sungai agar dampak abrasi dapat dikurangi dengan penanaman pohon bakau. Penyusunan program penanggulangan masalah abrasi sudah disusun berdasarkan informasi yang diterima dari kondisi abrasi yang ada, namun permasalahan yang ditemui pada saat melakukan penyusunan program pembangunan ini belum memadai sumber daya manusia yang dapat di andalkan untuk penyusunan program pembangunan. Penyusunan program pembangunan tentunya harus memperhitungkan secara rinci dan berkesinambungan agar hasil pembangunannya nanti membuahkan hasil yang terbaik yang dapat mengurangi kerusakan yang diakibatkan abrasi.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Welly Zukiar, ST (Kepala Bidang Sumber Daya Air) tentang program pembangunan yang terealisasi dan hambatan dalam pembangunan:

“program untuk menangani abrasi dalam bentuk pembangunan untuk saat ini kami masih mengupayakan meloby pemerintah provinsi maupun pusat agar dapat merealisasikan program kami yaitu pembangunan turap disekitaran wilayah sungai yang terkena abrasi dan untuk hambatan sendiri yang pastinya anggaran, apalagi sekarang ini masih masa pandemi covid-19 pemerintah lebih mengupayakan untuk menangani pandemi.”

(Hari Selasa, 15 September 2021 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air, pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa anggaran bagi pembangunan sangat penting karena jika anggaran atau dana tersedia maka realisasi pembangunan talud atau turap pada area yang terkena abrasi dapat dilaksanakan dengan lancar. Karena anggaran untuk pembangunan talud atau turap belum ada, tidak mungkin bisa membangun turap ke daerah-daerah secara menyeluruh sedangkan pemerintah perlu memperhatikan bencana abrasi tersebut mengingat dampak abrasi sudah sangat serius dan mengganggu aktivitas, keselamatan, dan perekonomian masyarakat.

Sedangkan didalam kenyataannya peneliti menemukan hambatan yang bukan hanya dari segi anggaran saja, namun terdapat hambatan lainnya seperti berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pertama yang mempengaruhi penghambat dalam pengawasan dan pembangunan fisik di Kabupaten Rokan Hilir, dilihat dari segi pengetahuan, kemampuan, dan keahliannya yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, karena pengetahuan dan kemampuan adalah modal pertama dalam melaksanakan pengawasan dalam pembangunan fisik di Kabupaten Rokan Hilir ini.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Rokan Hilir secara kelembagaan, eksistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Kualitas pegawai yang ada masih kurang, dengan kata lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir harus dapat meningkatkan kualitas para pegawai yang ada, agar dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan lancar, karena kualitas pegawai dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pengawasan, pembangunan, pengendalian, pemeliharaan dan juga pengelolaan di Kabupaten Rokan Hilir.

Selanjutnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat di wilayah yang tinggal sekitar pesisir sungai rokan sendiri belum memadai, perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat pentingnya menanggulangi permasalahan abrasi agar kedepannya masyarakat siap tanggap dalam penyelesaian masalah abrasi di sungai rokan.

Permasalahan yang sama juga pernah terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Julis (2016) pemahaman masyarakat masih sangat rendah akan dampak dari abrasi secara keseluruhan selain itu kesadaran untuk pelestarian lingkungan sekitar masih rendah. Sehingga pemerintah harus memberikan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat dan memberikan motivasi agar bisa mengantisipasi apabila terjadi abrasi, masyarakat tidak harus menunggu bantuan dari pemerintah tapi ikut serta dalam menjaga lingkungan di sekitar kawasan Pantai.

b. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan, baik alat-alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dapat melaksanakan pembangunan, pengendalian, pemeliharaan dan juga pengelolaan di Kabupaten Rokan Hilir apabila tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk operasional kegiatan penanggulangan bencana abrasi yang terjadinya di sungai rokan.

2. Pengelolaan

Untuk mengatasi abrasi diperlukannya pengelolaan supaya suatu program bisa berjalan dengan baik dan pengelolaan dengan melibatkan peran masyarakat didalamnya. Mengingat abrasi yang terjadi masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah, sebagai contoh dikelurahan rimba melintang dimana terdapat ratusan rumah, mushola, juga kuburan yang masuk kesungai akibat dari abrasi, hal

ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat. Maka diperlukannya pengelolaan dalam membantu masyarakat mengatasi masalah abrasi.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Welly Zukiar, ST (Kepala Bidang Sumber Daya Air) tentang program pelaksanaan pengelolaan dan koordinasinya untuk menangani abrasi :

“Untuk program dalam pelaksanaan pengelolaan pihak dinas pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan pengelolaan anggaran serta ketepatan laporan biaya anggaran. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat yaitu balai wilayah sungai sumatera III agar pengelolaan tercapai sesuai yang diharapkan, tetapi belum bisa menjalankan program karena anggaran belum ada.”

(Hari Selasa, 15 September 2021 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air, pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis lakukan, dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan program pengelolaan yang dilakukan oleh dinas PUTR sendiri berfokus pada pengelolaan anggaran penanganan abrasi. Pengelolaan anggaran sangat diperlukan agar tidak terjadi kekurangan anggaran sehingga pada saat dibutuhkan, anggaran yang tersedia dapat di kelola sesuai pada perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya terkait koordinasi dalam melaksanakan pengelolaan abrasi, dinas PUTR selalu berkoordinasi dengan dinas

terkait dan dengan kantor pusat untuk mendapatkan solusi bagaimana cara yang tepat pengelolaan masalah abrasi.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Welly Zukiar, ST (Kepala Bidang Sumber Daya Air) tentang pengawasan yang dilakukan oleh dinas PUPR terkait pengelolaan :

“Setiap melakukan pembangunan, fungsi pengawasan diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan dilapangan seperti pengurangan anggaran yang telah ditentukan sesuai kebutuhan pembangunan, dan kami selalu mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan masalah abrasi ini baik dari segi fisik bangunan penahan abrasi yg sudah ada serta mengawasi kondisi kawasan pesisir sungai rokan seperti kondisi tanaman-tanaman pohon mangrove. Jika banyaknya pohon mangrove yang tumbang akibat abrasi, kami akan bekerja sama dengan dinas kehutanan untuk menangani masalah tersebut.”

(Hari Selasa, 15 September 2021 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air, pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, dapat dijelaskan tentang pengawasan pembangunan sangat perlu dilakukan, hasil temuan peneliti pada saat survey dilokasi yang pernah dibangun turap belum efektif karena bangunan turap sendiri tidak mampu menahan kuatnya gelombang air dan terjadi abrasi sehingga turap yang dibangun juga hancur akibat dari abrasi. Pemerintah perlu mengevaluasi pembangunan yang dilakukan agar pembangunan turap berhasil dan mampu menahan gelombang air. Pengawasan yang dilakukan oleh

dinas PUTR perlu memperhatikan dan mengestimasi material yang digunakan untuk pembangunan turap yang kokoh, dana yang dikeluarkan untuk pembelian barang, dan pengawasan pada saat pengerjaan turap. Dinas PUTR perlu memberikan pelatihan dan pengembangan skill kepada karyawan agar pada perencanaan pembangunan berikutnya, karyawan dapat memberikan hasil pembangunan yang terbaik. Selain itu dinas PUTR juga perlu melakukan pekerjaan rutin dalam pemantauan berkesinambungan untuk mengecek kondisi turap sehingga ketika terjadi kerusakan, dinas PUTR dapat cepat tanggap dalam memperbaiki bangunan turap dan abrasi dapat ditangani dengan baik.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Welly Zukiar, ST (Kepala Bidang Sumber Daya Air) tentang realisasi program pengelolaan dan hambatan dalam pengelolaan :

“untuk program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air masih dalam rencana kegiatan belum dapat dipastikan terealisasi dikarenakan masih proses pengajuan dengan pihak balai wilayah sungai sumatera III dan untuk hambatan sendiri dalam pengelolaannya dari segi anggaran”.

(Hari Selasa, 15 September 2021 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air, pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, Pengelolaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah ataupun dinas terkait, masyarakat juga dibutuhkan partisipasinya dalam pengelolaan penanggulangan

abrasi. Dengan melibatkan masyarakat pesisir sungai rokan dalam menjaga dan melestarikan ekosistem di sekitaran sungai rokan, akan berdampak baik pada keberlangsungan lingkungan yang aman dan bencana abrasi dapat diatasi secara seksama. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pesisir di wilayah sungai rokan sangat tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat akan arti penting dari fungsi dan perlindungan pesisir. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat secara terus menerus. Tantangan ataupun kendala yang akan dihadapi dalam peningkatan kesadaran masyarakat pesisir sungai rokan tentang pengelolaan kerusakan pesisir antara lain dengan model pengelolaan kerusakan pesisir berbasis masyarakat. Dalam hal ini peran masyarakat dalam menanggulangi kerusakan pesisir dengan cara ekologis maupun dengan cara teknis untuk memecah gelombang pasang yang menghantam bibir pantai. Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa mekanisme model pengelolaan kerusakan pesisir adalah sebuah proses yang mengikuti prinsip keberlanjutan, keanekaragaman dan kelestarian, hal ini memakan waktu yang cukup lama. Proses inilah yang akan memberikan fungsi perlindungan terakhir bagi masyarakat pesisir.

Pemberian pemahaman yang tepat bagi masyarakat pesisir tentang arti penting dari pengelolaan pesisir menjadi sangat vital. Dengan pemahaman yang benar, diharapkan masyarakat mau menjaga dan merawat lingkungan pesisir yang berada di wilayahnya. Selain itu, dengan melibatkan langsung masyarakat desa dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan pesisir, seperti kegiatan pembangunan konstruksi, sosialisasi, dan pelatihan, akan

memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kesadaran masyarakat akan nilai penting dari fungsi perlindungan pesisir berbasis masyarakat.

Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman untuk tinggal di desa yang berada di pesisir dari ancaman abrasi yang selalu mengintai, menjadi pemicu bagi setiap warga masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir sungai rokan untuk terlibat langsung secara aktif dalam setiap kegiatan perlindungan pesisir di desanya. Semangat inilah yang perlu dijaga dan dituangkan melalui kesepakatan bersama masyarakat desa dalam pengelolaan kawasan pesisir sungai desa secara baik dan berkelanjutan.

3. Pengendalian

Seksi perencanaan teknis sumber daya air mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Merencanakan kegiatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik aparatur maupun publik serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini dilakukan dengan menunjuk staf yang diberikan tugas untuk terjun kelapangan, sehingga mendapatkan informasi dan data yang akurat untuk mengatasi masalah yang ada sehingga dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin sehingga masalah kedepannya bisa diantisipasi.

- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi perencanaan teknis sumber daya air.
- c. Mencari, dan mengumpulkan, menghimpun mensistemasan dan mengolah data serta menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi perencanaan teknis sumber daya air sebagai kerangka acuan atau pedoman penyusunan rencana kegiatan. Program pengendalian ini bertujuan untuk meminimalisir masalah yang ada, didalam pengendalian masalah abrasi ini, pengendalian sangat diperlukan mengingat tahun ketahun wilayah pesisir kabupaten rokan hilir mengalami kerusakan cukup parah, terutama yamng berhadapan langsung dengan selat melaka yang memiliki karekteristik gelombang laut yang cukup kuat.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Welly Zukiar, ST (Kepala Bidang Sumber Daya Air) terkait bentuk pengendalian abrasi, beliau mengatakan :

“Untuk program dari pengendalian ini, yaitu program pengendalian banjir, irigasi dan rawa dan kalau masalah abrasi pengendalian ini dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan bidang pembangunan, mengawasi pembangunan.”

(Hari Selasa, 15 September 2021 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air, pukul 09.00 WIB)

Dari wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, Maka dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap kinerja dinas PUTR dalam melaksanakan program yang ada, apakah sudah berhasil atau malah sebaliknya juga ada kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing seksi dalam bidang sumber daya air untuk mewujudkan pembangunan dalam mengatasi abrasi.

- d. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas seksi perencanaan teknis sumber daya air serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecah masalah. Untuk itu dalam hal ini dilakukan pengendalian untuk mengatasi masalah dengan mengumpulkan data yang ada kemudian dianalisis untuk diajukan didalam proposal bidang sumber daya air dalam bentuk masalah pengendalian.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengendalian sumber daya air. Adapun tujuan hal ini yaitu bertujuan agar kebijakan yang dibuat lebih terarah.
- f. Mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan pengelolaan seksi perencanaan teknis sumber daya air sebagai pedoman pemecah masalah. Untuk itu dilakukan dengan memulai sebuah program yang ada, kemudian dilakukan pembangunan didalamnya, selanjutnya bukan hanya dengan melakukan penanaman pohon bakau saja, tetapi juga perlu pengendalian terhadap masyarakatnya dikarenakan abrasi

yang terjadi bukan hanya merusak alam tetapi mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal ditepi pantai.

- g. Memantau pelaksanaan program kegiatan unit kerja melalui rapat dan laporan tertulis serta peninjauan lapangan dibidang pengendalian untuk mengetahui permasalahan dan perkembangannya.
- h. Menilai dan menelaah pelaksanaan pengendalian bidang sumber daya air untuk diajukan kepada atasan apakah sudah mencapai target yang ditentukan atau ada hambatan dalam pengerjaan proyek pembangunan fisik dalam pengendalian.
- i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/dinas terkait dan dengan lembaga lainnya dalam rangka pengendalian sumber daya air dalam mencegah dan menanggulangi abrasi.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sumber daya air tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil untuk menyelesaikan pekerjaan yang apabila terjadi penyimpangan agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya.
- k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan terkait dengan program pengendalian fisik apakah sudah mencapai target yang ditentukan atau ada hambatan dalam pengerjaan proyek pembangunannya.
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sumber daya air secara lisan maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas bidang

sumber daya air. Pengendalian sangat diperlukan untuk mengatasi abrasi supaya tidak meluas, khususnya didalam membantu pembangunan, seperti dilakukannya pemantauan saat melakukan pembangunan turap/talud dan tanggul bahkan sejenisnya supaya tidak terjadi kecurangan dalam pembangunan.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan sangat dibutuhkan didalam sosialisasi kemasyarakatan mengingat abrasi semakin meluas dan terjadinya penebangan hutan bakau secara ilegal, sehingga terjadinya ketidakseimbangan ekosistem didaerah pantai yang terkena abrasi.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Welly Zukiar, ST (Kepala Bidang Sumber Daya Air) tentang pemeliharaan turap, beliau mengatakan :

“Abrasi ini memang sudah masuk kedalam program pemerintah, rencananya akan memperbaiki dan menambah bangunan turap untuk mengatasi abrasi, namun pembangunan ini dilakukan bukan di Kelurahan Rimba Melintang melainkan didaerah bangko kiri kecamatan bangko pusako karena abrasinya sudah sangat parah memakan jalan lalu lintas masyarakat dan kami akan mengupayakan pembangunan secepatnya. Nanti kami akan bekerja sama dengan dinas kehutanan untuk melakukan penanaman pohon bakau”.

(Hari Selasa, 15 September 2021 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air, pukul 09.00 WIB)

Dari wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, maka dapat dijelaskan bahwa akan adanya rencana program kerja pemeliharaan yang dilaksanakan oleh dinas PUTR dalam menangani masalah abrasi tetapi bukan di daerah Kelurahan Rimba Melintang. Hal tersebut sangat disayangkan karena pemerintah hanya dapat menindaklanjuti program pemeliharaan hanya pada beberapa daerah tertentu saja padahal daerah yang terdampak bukan hanya di Bangko Kiri saja melainkan diberbagai daerah sekitaran pesisir sungai rokan termasuk di Kelurahan Rimba Melintang.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Welly Zukiar, ST (Kepala Bidang Sumber Daya Air) tentang kendala dalam pemeliharaan, beliau mengatakan :

“Yang menjadi kendala kami dalam program pemeliharaan bangunan turap yang sudah ada di kawasan pesisir sungai rokan yaitu anggaran untuk program pemeliharaan bangun turap sangat sedikit sehingga menghambat semua program dari dinas PUTR untuk menangani abrasi. Selain itu dari pihak pemerintah daerah setempat lambat memberikan informasi laporan kami terima dari pemerintah daerah setempat dan laporan yang sudah diterima tidak dijelaskan secara rinci dan tidak disertai dokumentasi yang terjadi dilapangan”.

(Hari Selasa, 15 September 2021 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air, pukul 09.00 WIB)

Dari wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa dinas PUTR menjadi pasif karena keterbatasan anggaran untuk program pemeliharaan bangunan talud sehingga dinas tersebut tidak dapat

memberikan harapan terlalu banyak kepada daerah-daerah yang terdampak abrasi. Mengenai lambatnya informasi laporan dari daerah yang terkena abrasi seharusnya menjadi evaluasi bagi dinas PUTR untuk dapat lebih aktif mencari informasi tidak hanya menunggu laporan dari daerah yang terkena abrasi. Seharusnya pemerintah atau dinas terkait melakukan pengawasan rutin dengan tujuan monitoring pembangunan yang telah dilakukan dan jika ditemukan kerusakan terhadap bangunan turap yang sudah ada, pemerintah dapat melaksanakan program pemeliharaan untuk penanganan masalah abrasi.

C. Dampak Bencana Abrasi Terhadap Masyarakat di Kelurahan Rimba Melintang

Kerusakan di wilayah pesisir sungai rokan khususnya di Kelurahan Rimba Melintang mengalami masalah yaitu abrasi. Kerusakan yang diakibatkan oleh abrasi sangat berdampak buruk bagi masyarakat dan tidak adanya sabuk hijau (*Greeb Belt*). Walaupun alam memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri (*recovery*). Namun, kerusakan abrasi yang berkelanjutan dikhawatirkan dalam waktu relatif singkat akan membawa dampak negatif yang semakin komplek pada lingkungan pesisir seperti : terganggunya kehidupan disekitar wilayah pesisir sungai rokan, berkurangnya keindahan pesisir sungai, dan masyarakat tidak memanfaatkan wilayah pesisir pantai untuk aktivitas sosial dan budaya. Berbagai penyebab kerusakan abrasi di wilayah pesisir sungai rokan adalah belum terpadunya pengelolaan dan pengendalian wilayah pesisir sungai. Oleh karena itu

perlu dilakukan studi intensif guna mendukung proses pemetaan daerah rawan kerusakan akibat abrasi dan model pengelolaannya.

Dampak kerusakan abrasi yang dirasakan oleh masyarakat sekitaran wilayah sungai rokan sangat berpengaruh terhadap keselamatan perekonomian masyarakat. Walaupun kerusakan abrasi ini belum pernah mengancam nyawa, namun kerusakan abrasi yang terjadi secara terus menerus dapat merugikan bagi masyarakat setempat yaitu kehilangan asset dan mata pencaharian sehari-hari.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat terkait penanggulangan abrasi yang terjadi dikelurahan rimba melintang yang disampaikan oleh salah satu responden Bapak Iskander, SE (Lurah Rimba Melintang) menyatakan bahwa :

“Kondisi abrasi sudah lama terjadi di wilayah sungai rokan yang semakin lama semakin melebar dan menghancurkan lahan pertanian warga sekitar yang jaraknya tidak jauh dari sungai rokan. Selain lahan pertanian, rumah-rumah warga juga hancur, beruntung tidak ada korban nyawa dan bagi warga yang mempunyai bangunan yang tidak permanen dapat dipindahkan. Namun banyak juga rumah warga yang semi permanen dan permanen yang tidak dapat dipindahkan sehingga masyarakat setempat yang tinggal di pesisir sungai kehilangan tempat tinggal. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini belum ada tindak lanjut yang dapat mengurangi abrasi. Pembangunan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan pada tahun 2007 yang lalu,

setelah itu sampai saat ini belum ada tindak lanjut mengenai pembangunan untuk penanggulangan bencana abrasi ini.”

(Hari Rabu, 16 September 2021 di Kelurahan Rimba Melintang, pukul 10.00 WIB)

Dari wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan salah satu masyarakat setempat dapat disimpulkan bahwa selama ini program pembangunan untuk pencegahan abrasi dan pemecah ombak belum pernah dilakukan oleh pemerintah semenjak tahun 2007 khususnya di Kelurahan Rimba Melintang. Namun, pembangunan untuk penanganan abrasi ada dilakukan tetapi bukan di daerah Kelurahan Rimba Melintang melainkan di daerah lainnya. Karena pemerataan pembangunan ini kurang banyak disentuh kesemua wilayah yang terdampak abrasi sehingga keterlibatan Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang dalam mengatasi penanggulangan bencana abrasi belum optimal. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk menangani kasus abrasi karena sangat berdampak buruk bagi masyarakat dan alam sekitar. Jika dibiarkan terus menerus, maka luas daratan wilayah kelurahan Rimba Melintang dan daerah lainnya yang terdampak bencana abrasi akan berkurang. Selain itu, program pengelolaan dan pengendalian abrasi juga perlu ditindaklanjuti secara berkesinambungan karena abrasi bisa datang kapan saja dan dapat merusak ekosistem disekitar pesisir sungai. Optimalisasi penanggulangan kerusakan yang diakibatkan oleh abrasi sangat dibutuhkan menimbang banyaknya keluhan dari masyarakat setempat kepada pemerintah yang tidak memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Koordinasi juga perlu ditingkatkan antara

pimpinan daerah kepala desa dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten serta dinas terkait untuk memecahkan masalah abrasi.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat terkait permasalahan abrasi yaitu hilangnya asset jangka panjang yang membuat pendapatan masyarakat juga berkurang sepertinya hilangnya perkebunan dan rumah warga setempat. Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Bapak Amat (Nelayan) dan Ibu Masni (Ibu Rumah Tangga) di Kelurahan Rimba Melintang :

“Untuk dampak abrasi yang kami rasakan yaitu beberapa warga kehilangan tempat tinggal, ada juga yang berkurang dan kehilangan lahan kebun sawit. Jadinya warga sebelumnya yang terdampak banyak yang pindah dan bagi warga yang lahannya habis terkena abrasi membuat kami kehilangan pendapatan”.

(Hari Rabu, 16 September 2021 di Kelurahan Rimba Melintang, pukul 13.00 WIB)

Dari wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, tersebut dapat dijelaskan bahwa dampak abrasi sangat merugikan masyarakat karena beberapa orang harus kehilangan asset jangka panjang yang berharga seperti perkebunan kelapa sawit dan lahan menanam padi. Permasalahan ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan meningkatnya jumlah kemiskinan dikalangan masyarakat Kelurahan Rimba Melintang. Jika masalah abrasi terus dibiarkan tanpa adanya solusi dari pemerintah untuk mengatasi kerusakan yang diakibatkan dari abrasi, maka dapat mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat sehari-hari dan mengurangi luas wilayah di Kelurahan Rimba Melintang. Masyarakat tentunya

menginginkan kualitas hidup yang layak walaupun berdomisili di daerah rawan abrasi, maka peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat seharusnya dapat memberikan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan masyarakat agar tingkat kemiskinan dapat di minimalisir. Jika fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah khususnya untuk mengurangi bencana abrasi, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kelurahan Rimba Melintang.

Program dari pemerintah yang masuk di Kelurahan Rimba Melintang berdasarkan informasi yang diterima oleh peneliti dari responden Bapak Satimin (Nelayan) :

“Program pemerintah yang masuk di Kelurahan Rimba Melintang untuk penanganan masalah abrasi belum ada, namun program lainnya bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat dari abrasi diberikan bantuan rumah layak huni oleh pemerintah”.

(Hari Rabu, 16 September 2021 di Kelurahan Rimba Melintang, pukul 13.00 WIB)

Dari wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa program pemerintah untuk mengatasi masalah abrasi khususnya di Kelurahan Rimba Melintang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk penanganan masalah abrasi. Karena tidak adanya program pembangunan dari pemerintah di Kelurahan Rimba Melintang menimbulkan persepsi dan stigma negatif masyarakat kepada pemerintah karena tidak memperhatikan masalah yang dialami masyarakat. Tingkat kepercayaan

masyarakat Rimba Melintang kepada pemerintah mulai berkurang tidak sesuai dengan janji-janji politik yang disampaikan kepada masyarakat.

Faktor penyebab abrasi di Kelurahan Rimba Melintang berdasarkan informasi dari responden Bapak Ijus (Nelayan) :

“Penyebab terjadinya abrasi disungai ini karena kuatnya gelombang air pasang dan angin kencang yang setiap harinya mengikis bibir sungai. Pohon bakau yang ada di pinggir sungai juga tidak mampu menahan gelombang air pasang yang kuat sehingga banyak pohon bakau juga tumbang dan hanyut akibat dari gelombang arus sungai yang kuat.”

(Hari Rabu, 16 September 2021 di Kelurahan Rimba Melintang, pukul 14.00 WIB)

Dari wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa kawasan sepanjang sungai rokan sendiri belum ada pemecah gelombang yang dapat menahan kuatnya gelombang air pasang. Jika pembangunan untuk pencegahan abrasi dilakukan secara optimal dan menyeluruh maka abrasi dapat diatasi dengan maksimal. Tetapi kembali kepada kemampuan pemerintah dalam menanggulangi kerusakan akibat abrasi yang terjadi di sungai rokan khususnya di Kelurahan Rimba Melintang.

Kurangnya perencanaan Mitigasi Bencana, Mitigasi bencana yang dimaksud adalah yang bersifat structural yaitu penanaman mangrove. Berdasarkan keterangan dari masyarakat Kelurahan Rimba Melintang, hambatan masyarakat untuk menanam mangrove ialah karena gelombang dan angin di sungai sangat

kuat, sehingga mangrove tersebut tidak bisa tumbuh atau hidup dan terbawa oleh gelombang ketepian. Dari keterangan diatas peneliti memahami bahwa kurangnya Perencanaan Mitigasi Bencana. Menjadi salah satu keterbatasan dalam tata kelola bencana abrasi di Kelurahan Rimba Melintang yang mengakibatkan hanya masyarakat yang bergerak melakukan penanaman mangrove. Karena keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai strategi yang digunakan untuk menanam mangrove dikondisi daerah dengan tingkat gelombang air dan angin yang kuat. Disini dinas terkait seperti Dinas Kehutanan sangat berperan penting memberikan wawasan kepada masyarakat dan bekerja sama agar permasalahan abrasi dapat diatasi secara bersama-sama baik dari pemerintah maupun dari masyarakat juga dapat memberikan kontribusi untuk kepentingan bersama.

Karena mitigasi bencana sangat dibutuhkan dalam mengurangi resiko bencana baik sebelum terjadi bencana, sedang terjadi bencana, dan sesudah terjadi bencana. Mitigasi Bencana perlu dikonsepskan secara rinci dan berlandaskan teori agar perencanaan penanggulangan bencana dapat diatasi secara optimal.

D. Faktor Penghambat Dalam Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)

Disini penulis akan menjelaskan apa saja yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang)

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Welly Zukiar, ST (Kepala Bidang Sumber Daya Air) beliau mengatakan :

“ untuk hambatan sendiri yang pastinya anggaran, apalagi sekarang ini masih masa pandemi covid-19 pemerintah lebih mengupayakan untuk menangani masalah pandemi.”

(Hari Selasa, 15 September 2021 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air, pukul 09.00 WIB)

Dapat disimpulkan bahwa anggaran sangat penting bagi pembangunan karena dengan adanya anggaran atau biaya untuk melakukan pembangunan turap, talud dan lain-lain, dikarenakan anggaran yang minim pembangunan turap tidak mungkin bisa dibangun kesemua daerah yang terkena dampak abrasi yang semakin meluas mengingat dampak abrasi sudah sampai ketahap yang serius.

Sedangkan didalam kenyataannya peneliti menemukan hambatan yang bukan hanya dari segi anggaran saja, namun terdapat hambatan lainnya seperti berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pertama yang mempengaruhi penghambat dalam pengawasan dan pembangunan fisik di Kabupaten Rokan Hilir, dilihat dari segi pengetahuan, kemampuan, dan keahliannya yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, karena pengetahuan

dan kemampuan adalah modal pertama dalam melaksanakan pengawasan dalam pembangunan fisik di Kabupaten Rokan Hilir ini.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Rokan Hilir secara kelembagaan, eksistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Kualitas pegawai yang ada masih kurang, dengan kata lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir harus dapat meningkatkan kualitas para pegawai yang ada, agar dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan lancar, karena kualitas pegawai dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pengawasan, pembangunan, pengendalian, pemeliharaan dan juga pengelolaan di Kabupaten Rokan Hilir.

Selanjutnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat di wilayah yang tinggal sekitar pesisir sungai rokan sendiri belum memadai, perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat pentingnya menanggulangi permasalahan abrasi agar kedepannya masyarakat siap tanggap dalam penyelesaian masalah abrasi di sungai rokan.

b. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan, baik alat-alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan

Hilir dapat melaksanakan pembangunan, pengendalian, pemeliharaan dan juga pengelolaan di Kabupaten Rokan Hilir apabila tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk operasional kegiatan penanggulangan bencana abrasi yang terjadinya di sungai rokan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan pada Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang) :

1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum berjalan secara maksimal dalam menanggulangi permasalahan abrasi yang terjadi di Kelurahan Rimba Melintang. Hal tersebut disebabkan karena penanganan abrasi yang belum berjalan dengan baik secara menyeluruh. Jika dilihat dari segi pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan memang sudah berjalan tetapi belum maksimal karena pembangunan yang direalisasikan tidak merata diseluruh daerah yang terdampak abrasi khususnya di wilayah Kelurahan Rimba Melintang tidak tersentuh sama sekali pembangunan dalam penanganan abrasi. Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum an Penataan Ruang terakhir kali pada tahun 2007, dalam 14 tahun terakhir pemerintah belum pernah membuat program pembangunan untuk menangani permasalahan abrasi di Kelurahan Rimba Melintang. Turap yang pernah dibangun oleh pemerintah saat ini kondisinya sudah rusak atau tidak berfungsi untuk menahan abrasi dikarenakan tidak adanya pemeliharaan atau pengelolaan yang berkesinambungan, sementara kerusakan yang diakibatkan oleh abrasi sampai saat ini semakin parah.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan indikator pada Optimalisasi Penanganan Abrasi di Kawasan Sungai Rokan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Melintang) belum terlaksana secara optimal karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menangani permasalahan abrasi masih tergolong minimalis sehingga upaya penanganan abrasi tidak bisa tercapai secara maksimal. Kurang optimalnya upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani permasalahan abrasi bukan hanya dari segi kinerja dinas tersebut melainkan keterbatasan anggaran untuk investasi pengurangan resiko bencana abrasi, kewenangan, kondisi daerah dan kurangnya perencanaan dalam mitigasi bencana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir segera melakukan pembangunan ataupun mengusulkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mengatasi abrasi, hal ini mengingat bahwa luasnya kawasan abrasi yang sudah semakin parah di kawasan sungai rokan Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kelurahan Rimba Melintang. Apabila ada program pembangunan turap atau

bangunan penahan gelombang lainnya dalam mengatasi abrasi diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dapat melakukan pemeliharaan dan pengelolaan lebih lanjut agar bangunan tersebut dapat terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini mengingat bahwa pada pembangunan turap di tahun 2007 di Kelurahan Rimba Melintang yang hanya bertahan beberapa tahun dan saat ini telah mengalami kerusakan dan tidak berfungsi lagi di karenakan tidak adanya pemeliharaan ataupun pengelolaan lebih lanjut setelah dibangun.

2. Pemerintah diharapkan lebih meningkatkan lagi upaya untuk menangani permasalahan abrasi tidak hanya melalui pembangunan tetapi melakukan perbaikan ekosistem disekitaran pesisir sungai dengan menyemarakkan penanaman pohon mangrove dan kegiatan penghijauan lainnya agar dampak abrasi dapat dikurangi.
3. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan masyarakat yang terdampak abrasi melalui program bantuan sosial dan kegiatan sosialisasi dalam upaya bergotong-royong bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam penanggulangan bencana abrasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ndraha, Taliziduhu 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wasistiono, Sadu & Rauf, Rahyunir 2014. *Pelayanan publik* Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Usman, Husaini & Setiady Akbar, Purnomo 2008. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Kodoate, Robert J dan Roesstam Sjarif 2010. *Tata Ruang Air*. PT. Andi Aakin
- M. Julis, 2016. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Tanggap Bahaya Abrasi di Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan Kota Padang*. Kota Padang.
- Meiwanda, Geovani dan Fitriani, 2021. *Rencana Abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti*. Kepulauan Meranti.
- Heryati, Sri 2020. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang, Jawa Barat*.
- Nurbaity, Iin, 2018. *Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penanggulangan Banjir Rob di Desa Alhair Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2011-2015*. Pekanbaru.
- Astra Wesna, I Gede 2015. *Model Pengelolaan Kerusakan Pantai Berbasis Masyarakat Pesisir di Kabupaten Buleleng*. Singaraja.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Riau

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir

Buku Pedoman Penulisan *Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja
Mahasiswa*. Edisi Revisi 2013. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau.

